NALAR FILOSOFIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) DALAM TATA KELOLA FILANTROPI ISLAM BERBASIS MASJID DI SURABAYA

Imron Mustofa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

imron_mustofa@uinsby.ac.id

Abstract: This article examines the governance of Islamic philanthropy as an economic movement for the people based on the Surabaya al-Akbar Mosque. It is undeniable that the fulfilment of community needs cannot be separated from the completion of their financial requirements. Al-Akbar Mosque has excellent potential as an implementation of Islamic values in fulfilling the Sustainable Development Goals. Armed with a philosophical analysis approach, this article focuses on studying the philosophical foundations in the performance and governance of Islamic philanthropic funds at the Al-Akbar Mosque. This study found several findings: The paradigm of economic development based on the Al-Akbar mosque appears to have expanded its meaning from the point of view of the conventional economy. In addition, Islamic philanthropy funds are managed based on the distribution of ratios between mosque sectors: tarbiyah, secretariat, ri'ayah and imarah.

Keywords: *Islamic Philanthropy; Sustainable Development Goals; Mosque based Economy; al-Akbar; Muamalah*

Abstrak: Artikel ini mengkaji tata kelola filantropi Islam sebagai gerakan perekonomian umat berbasis Masjid al-Akbar Surabaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan ekonominya. Masjid al-Akbar memiliki potensi besar sebagai implementasi nilai-nilai Islam dalam pemenuhan Sustainable Development Goals. Berbekal pendekatan analisis filosofis, artikel ini berfokus pada kajian landasan filosofis dalam implementasi dan tata kelola dana filantropi Islam pada Masjid Al-Akbar. Kajian ini menemukan beberapa temuan: Paradigma pembangunan ekonomi berbasis masjid Al-Akbar tampak mengalami perluasan makna dari sudut pandang perekonomian konvensional. Selain itu, dana filantropi Islam dikelola berdasarkan pembagian rasio antar sektor masjid: tarbiyah, kesekretariatan, ri'ayah dan imarah.

Kata Kunci: *Filantropi Islam; Sustainable Development Goals; Ekonomi Masjid; al-Akbar; Muamalah.*

Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering kali mendiskusikan persoalan penciptaan kehidupan dunia yang tentram, harmonis, aman dan sejahtera. Guna mewujudkan tujuan tersebut PBB tidak hanya mengorganisir negara-negara pesertanya saja akan tetapi juga membuat organisasi-organisasi yang ada di bawah naungannya. Organisasi tersebut memiliki peran, tujuan dan fungsi tersendiri. Beberapa organisasi di bawah PBB mulai dari dewan keamanan, bekerja dalam bidang peradilan serta menciptakan mahkamah internasional sebagai tempat pencari keadilan bagi subyek hukum internasional dan penyelesaian sengketa internasional; *World Health Organization* (WHO), lembaga yang bekerja di sekitar kondisi kesehatan dunia; perlindungan dan pengayoman anak-anak yang dilakukan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF); melindungi warisan peradaban manusia dan alam di bawah pantauan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO); dalam memanusiaikan pekerja atau buruh hadir *International Labour Organization* (ILO) sebagai lembaga yang memfokuskan dirinya; serta dalam pengentasan masalah ekonomi dilembagakan oleh *International Monetary Fund* (IMF).¹ Selain membentuk peranan organisasi PBB mulai tahun 2000 telah merencanakan pembangunan berkelanjutan sebagai wujud tujuan yang bersifat global dan harus diwujudkan oleh semua negara, tujuan tersebut adalah *Millenium Development Goals* (MDGs) yang mana harus tercapai mulai tahun 2000 sampai tahun 2015 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mana harus tercapai mulai tahun 2015 tahun 2030.²

Tujuan global ini mendorong kepada negara yang kaya untu menambah dana bantuan, menghapuskan penghambat dalam

¹ Made, "28 Organisasi Dibawah PBB Beserta Tugas-Tugasnya," accessed June 23, 2021, <https://made-blog.com/organisasi-di-bawah-naungan-pbb/>.

² Ishotono Ishotono and Santoso Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan," *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (December 24, 2016): 159, accessed June 23, 2021, <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13198/0>.

dunia perdagangan dan investasi, menghapus hutang-hutang yang mana tidak dapat dibayarkan oleh negara yang mengalami krisis.³ Indonesia memiliki *Sustainable Development Goals* (SDGs) tersendiri yang secara eksplisit termaktub dalam alenia 4 Preambule UUD 1945. Dalam alenia tersebut dikemukakan bahwa Indonesia mencita-citakan dirinya sebagai bangsa yang “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Kesamaan cita-cita inilah disinyalir sebagai salah satu faktor yang mendukung dan mengikuti target yang telah disepakati secara global tersebut. Tujuan ini diharapkan mampu terwujud pada tahun 2030. Indonesia mewujudkan atas kesepakatannya dan pelaksanaannya atas SDGs ini dengan meratifikasi dalam bentuk “Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan”. Ini menandakan Indonesia mencoba untuk konsisten dalam mencapai target yang ada di SDGs. Oleh karena itu guna mencapai target tersebut Indonesia diharuskan untuk memiliki satu cara efektif, cara tersebut adalah memberdayakan perekonomian berbasis masjid.

Konsep pembangunan ekonomi semacam ini sejatinya bukanlah terobosan baru karena konsep ini telah ada sejak lahirnya Islam yaitu sekitar 1400-an tahun silam. Meskipun konsep yang tidak tergolong baru namun konsep ini telah teruji keefektifannya. Dalam sejarahnya, Islam mencatat pernah menorehkan tinta kejayaannya dengan sarana ekonomi pembangunan Islam. Ia berupa tata kelola filantropi Islam seperti zakat, Infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), rampasan perang (*Ghanimah*) dan pengelolaan perpajakan (*Jizyah*).⁴ Di

³ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), 86.

⁴ Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak),” *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (November 11, 2016): 227–245, accessed June 23, 2021, <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>.

samping itu Rasul pun dalam menggerakkan kehidupan ekonomi, politik, dan kenegaraan sepenuhnya dilaksanakan dengan pusat aktivitasnya di Masjid. Ini disebabkan masjid sebagai simbol masyarakat Muslim secara kuantitas dan kualitas sangat potensial.⁵ Kegiatan pemakmuran masjid zaman ini dapat dilakukan dengan memberdayaan masjid dalam ranah ibadah dan muamalah. Hal ini mendorong minat penulis untuk mengadakan penelitian ini dengan tema perekonomian umat berbasis masjid di Masjid Al Akbar Surabaya. Peneliti berharap dengan pengoptimalan ekonomi berbasis masjid ini dapat berkontribusi terhadap Bangsa Indonesia dalam mewujudkan target yang ada pada SDGs. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan dengan pendekatan deduktif.

Ekonomi Berbasis Masjid sebagai Potensi Dasar Kesejahteraan

Ekonomi berbasis masjid merupakan sistem ekonomi baru di dunia perekonomian. Sejarah mencatat bahwa ekonomi berbasis masjid telah ada dan dicetuskan sejak era Nabi sekitar 1400 tahun silam. Pada saat itu Nabi mendirikan masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan kenegaraan dan kegiatan masyarakat (*mu'āmalah*). Salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perekonomian Muslim. Ekonomi berbasis masjid ini menggunakan asas kemaslahatan umat di lingkungan sekitar. Asas ini merupakan asas yang cukup *familiar* dan menjadi corak khas sistem ekonomi dalam Islam. Pemanfaatan masjid sebagai media sekaligus tempat yang strategis bagi umat Islam dan sebuah tempat sangat dekat dengan masyarakat, dapat mewujudkan kemaslahatan secara luas. Dari itu dalam konsep ekonomi berbasis masjid, dana filantropi Islam yang diperoleh sepenuhnya oleh masjid dapat lebih produktif dan berguna bukan semata bagi aspek

⁵ Hamdani, "Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Peradaban Umat Islam Halaman 1 - Kompasiana.Com," accessed April 23, 2021, <https://thr.kompasiana.com/cangkoiburong/5cd118936c329d111e5f07d3/menjadikan-masjid-sebagai-pusat-peradaban-ummat-islam>.

pengembangan fasilitas masjid, bahkan mencakup kamakmuran masyarakat sekitar masjid.⁶

Ide tentang ekonomi berbasis masjid lahir disebabkan pelbagai faktor. Salah satu faktor yang paling dominan barangkali cukup berlimpahnya saldo masjid yang bersumber dari dana sosial semacam zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Dana ini mulanya hanya ditimbun dan dinilai kurang produktif. Akhir-akhir ini, ada beberapa masjid yang cukup terkenal telah menerapkan konsep ekonomi semacam ini, seperti: Masjid Jogokariyan di Yogyakarta. Apa yang dikerjakan berawal dari konsep setiap waktu sholat wajib selalu dipenuhi oleh jamaah dan saldo kas setiap diumumkan pada waktu sholat jum'at selalu Rp.0 (nol rupiah). Masjid Jogokariyan menjadi menarik bukan hanya terkait saldo nol rupiah, tapi masjid ini juga dinilai masyarakat sekitar telah memberi manfaat yang cukup signifikan bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Salah satu yang dilakukan dengan memberikan kartu sehat masjid, fasilitas ruang publik yang berupa ruang olahraga serta akses *wifi* gratis. Kartu sehat masjid dapat digunakan untuk berobat di klinik dan rumah sakit manapun di Yogyakarta. Poin menarik dalam aktivitas ini alih-alih menyurutkan semangat masyarakat untuk memberikan dana sosialnya ke masjid, sebaliknya menumbuhkan antusias lebih bagi masyarakat untuk berinvestasi sosial dan akhirat. Rianz menegaskan bahwa bagi menurut pengurus DKM masjid Jogokariyan, filantropi Islam maknanya “mentasarufkan” menghindari penimbunan dana dengan secara cepat dan tepat memanfaatkannya bagi kepentingan umat.⁷ Dari pernyataan

⁶ Achmad Faqih Supandi, “Model Pengembangan Zakat Produktif Di Masjid Jami’ Al-Baitul Amien Jember Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (December 26, 2019): 113-130, accessed June 23, 2021, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/mabsya/article/view/3458>.

⁷ Rianz, “Masjid Jogokariyan Yang Saldo Kasnya Selalu Nol Rupiah,” accessed May 23, 2021, <https://akuratnews.com/masjid-jogokariyan-yang-saldo-kasnya-selalu-nol-rupiah/>.

tersebut tampak jelas bahwa beberapa “ekonom” Muslim mencoba menghadirkan satu sistem tata kelola keuangan berbasis masjid secara *real time* bagi kemaslahatan bersama. Caranya dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam.⁸

Apa yang coba diterapkan oleh masjid Jogokariyan telah setidaknya mencoba menerapkan satu konsep kesejahteraan dalam Islam. Al-Qur’an surah al-Quraisy ayat 1-4 secara eksplisit telah menyinggung konsep tersebut. Kesejahteraan bukan semata sebagai pertumbuhan ekonomi, namun mencakup dimensi lain. Setidaknya ada 4 indikator kesejahteraan yang terkandung di dalamnya: sistem nilai Islam, kekuatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, keamanan dan ketertiban sosial.⁹

Jika ditarik kedalam cakupan yang lebih luas, maka indikator pertama dapat terjemahkan bahwa kesejahteraan tidak mungkin akan terwujud selama cara yang digunakan tidak mencerminkan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sistem nilai Islam ini merupakan hal yang pokok menjadikan pedoman dan semangat untuk umat Islam melangkah secara optimis membawa perubahan dan mendapatkan rida dari Allah. Indikator kedua dapat diartikan bahwa kesejahteraan dapat diwujudkan hanya dengan menyediakan satu sistem yang dapat secara tepat dan akurat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat. Mesin perekonomian ini merupakan dasar yang menggerakkan segala aktivitas perekonomian masyarakat dalam sektor riil. Sektor riil inilah yang akhirnya bersentuhan paling dekat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus berperan sebagai sumber penyedia lapangan pekerjaan. Tersedianya lapangan

⁸ Imron Mustofa, “Implementasi Mu’āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 1 (2020): 144–174,

<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4064>.

⁹ Irfan Syauqi and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 2nd ed. (Depok: Raja Grafindo, 2017), 29.

pekerjaan yang menjamin ketersediaan sektor keuangan atau perekonomian syariah merupakan satu basis yang membangun dan memperkuat pelbagai aktivitas akad antara masyarakat dengan pelbagai pihak terkait sektor riil yang berkelanjutan. Indikator ketiga, ketersediaan kekuatan ekonomi akan diperkuat dengan hadirnya satu sistem distribusi yang baik dan terkondisikan secara maksimal. Pendistribusian memerankan peran vital dalam pergerakan aneka kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan harga yang tidak bisa ditawar agar suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan artinya keterpenuhan segala kebutuhan mendasar melalui sistem pendistribusian secara baik dan adil hingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara menyeluruh. Proses jual beli sendiri sebenarnya merupakan gambaran ringkas tentang terjalannya rantai distribusi bersambung dari produsen kepada konsumen. Artinya, Islam mengajarkan distribusi harta yang dapat menekan angka kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat. Islam juga mengajarkan bahwa setiap lini perputaran roda perekonomian haruslah dapat didistribusikan, dinikmati dan dimanfaatkan semua lapisan masyarakat secara adil. Pada indikator keempat dijelaskan bahwa kesejahteraan dapat terwujud secara paripurna hanya jika aspek keamanan dan ketertiban sosial dapat terjamin. Ini juga dapat diartikan bahwa berbincang terkait pengelolaan manajemen konflik kepentingan yang baik akan melahirkan stabilitas keamanan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu tidak dapat disebut sejahtera jika kondisi di masyarakat tidak aman.¹⁰

Dalam mewujudkan satu kesejahteraan berpola ekonomi berbasis masjid memiliki beberapa tantangan atau kendala yang mana meski dibenahi. Permasalahan yang paling kentara

¹⁰ Imron Mustofa, "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'ân Abdullah Saeed," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (March 1, 2016): 465–591, accessed March 3, 2021, <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/321>.

adalah sumber daya masjid. Kurang memudahinya kualitas pengurus masjid dalam mengelola masjid menjadi pekerjaan rumah yang umum dihadapi oleh seluruh masjid. Salah satu tawaran solusi yang berkaitan dengan hal ini tidak lain adalah perlunya meningkatkan kualitas sumber daya melalui pelbagai proses *organizing, actualizing, monitoring* dan *evaluation*. Proses ini perlu dikerjakan melalui suatu rantai kegiatan pengarahan dan pelatihan secara terstruktur terkait tata kelola masjid, manajemen keuangan dan merapikan administrasi aset masjid. Poin penting dalam rangkaian proses ini adalah terjaganya prinsip dan nilai-nilai syariah dalam segala aktivitas.

Guna mengorganisasi para pengurus masjid dapat dilakukan melalui pembentukan satu organisasi yang mewadahi para pengurus masjid. Ide ekonomi berbasis masjid semacam ini mendapat respons baik dari organisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Indonesia. Beberapa proses sosialisasi gagasan ekonomi berbasis masjid dan pelatihan untuk para pengurus masjid telah dilaksanakan secara masif dan efektif. Bukan hanya DMI yang mendukung gagasan ekonomi berbasis masjid, ada juga beberapa organisasi lain yang berkorelasi dengannya, Sebut saja forum atau organisasi remaja di bawah naungan DMI yang bernama *Islamic Youth Economic Forum* (ISYEF). INSYED juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi dari masjid.¹¹ Langkah yang pernah ISYEF lakukan pada pemberdayaan salah satunya melalui sosialisasi tema yang terkenal di tahun 2018 “1 masjid, 1 komunitas, 1 usaha.” Gagasan ini melahirkan sekitar 139 komunitas remaja yang tergabung di dalamnya. Komunitas remaja itu mendapatkan modal 20 juta rupiah untuk modal usaha dan hasilnya dikelola untuk dipergunakan sebagai beasiswa para pengelola komunitas remaja masjid jaringan

¹¹ Tim Editor, “Resmikan ISYEF, Syarifuddin: Pemberdayaan Ekonomi Masjid,” accessed May 23, 2021, <https://era.id/afair/15409/resmikan-isyef-syarifuddin-pemberdayaan-ekonomi-masjid>.

ISYEF.¹² Hal ini dapat membuktikan bahwa ekonomi berbasis masjid dapat sebagai cara yang efektif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serta memberikan edukasi untuk para pemuda menjadi pengusahawan Islami. Lebih dari itu, saat ini ISYEF juga mulai memberdayakan pariwisata halal berbasis masjid dengan pertimbangan potensi yang dimiliki Indonesia yaitu memiliki masjid-masjid yang memiliki histori yang besar, estetika, dan simbol bagi sebuah daerah tersebut.

Dari penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa cara paling efektif dalam membentuk satu sistem ekonomi berbasis masjid sebagai potensi dasar kesejahteraan adalah melalui pemfokusan kembali semangat bahwa masjid merupakan fondasi mendasar dari kesejahteraan umat. Untuk melihat potensi dan tingkat efektivitas ekonomi berbasis masjid dapat ditemukan pada perbandingan antara jumlah desa dan jumlah masjid di Indonesia. Kata kuncinya adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya bagi masjid, dan masyarakat untuk mengelola lingkungan agar berdaya dan mandiri. Ini karena ekonomi berbasis masjid berprinsip kemandirian. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018 jumlah desa yang di Indonesia berjumlah 83.931 desa¹³ sedangkan jumlah masjid menurut sistem informasi masjid (SIMAS) tahun 2018 konon telah berjumlah sekitar 242.823 masjid di Indonesia. Hal ini dapat menjadi indikator keefektifan ekonomi berbasis masjid yang mana tiga kali lebih efektif untuk menumbuhkan perekonomian rakyat dibandingkan otonomi desa. Ini tidak berarti adanya pengesampingan peran pemerintah namun lebih kepada lebih memperlihatkan potensi ekonomi berbasis masjid yang sangatlah besar, terlebih lagi jika dimasifkan dan didukung kemajuannya oleh pemerintah. Poin utamanya,

¹² Dewan Masjid Indonesia, "ISYEF Lanjutkan Upaya Penguatan Ekonomi Masjid," accessed May 23, 2021, <https://www.dmi.or.id/isyef-lanjutkan-upaya-penguatan-ekonomi-masjid/>.

¹³ Badan Pusat Statistik, "Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018," accessed June 20, 2019, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html>.

masjid yang dikelola perekonomiannya dengan baik adalah masjid yang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitarnya terlebih lagi mampu menghadirkan perkembangan masyarakat secara positif di tingkat lokal maupun nasional secara merata.

***Sustainable Development Goals* dalam Nalar Ekonomi Berbasis Masjid**

Ekonomi berbasis masjid merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan umat menurut sudut pandang Islam. Ini dinilai wajar jika ekonomi berbasis masjid dapat dimasukkan dalam kajian ekonomi pembangunan sebab Islam sangat menekankan peran masjid bagi perkembangan umat. Pertumbuhan dan kesejahteraan umat secara Islami ini akan dapat mudah diwujudkan apabila media sentralnya, masjid, merupakan sebuah tempat yang strategis dan dekat dengan umat. Pernyataan semacam ini bukan hanya sebuah argumen belaka, namun memerlukan satu indikator sebagai alat ukur sebuah metode dapat terwujud. Indikator tersebut tidak lain mewujudkan pergerakan rodak perekonomian umat. Jika roda perekonomian umat berjalan maka akan dapat mewujudkan pertumbuh ekonomi. Komponen-komponen dasar dalam hal ini setidaknya mencakup sektor riil, sektor keuangan dan sektor pemerataan sosial atau filantropi (*equity*). Ketiga komponen dasar ini haruslah dijalankan sesuai dengan prinsip dan nilai Islam hingga mewujudkan *falāh* (kebahagiaan di dunia dan akhirat) yang merupakan tujuan utama agama Islam dan dapat diraih menggunakan konsep pembangunan ekonomi Islam.¹⁴

Peran sektor riil dalam pergerakan perekonomian ibarat mesin. Mesin dalam anatomi kendaraan merupakan instrumen penggerak utama. Ia merupakan aspek wajib hadir guna menjamin mobilitas yang lancar dan terjalannya prinsip kerja sama dalam memenuhi kepentingan bersama (hukum positif). Untuk mewujudkan itu dalam menjalankan sektor riil harus

¹⁴ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economic*, 2nd ed. (Malaysia: Zafar SDN BHD, 1981), 90.

sesuai dengan aneka ketentuan agama dan kepentingan bersama. Jika perjalanan sektor ini dapat terkondisikan dengan benar maka pergerakan perekonomian tidak akan mengalami gangguan berarti. Sebagai rangkaian mesin tidak dapat berjalan lancar dan akan cepat panas jika tidak ada pelumas pendukung yang disebut sektor keuangan. Sektor ini sebagai komponen terpenting bagi sektor riil guna menjamin efektivitas, efisiensi dan kualitas proses pergerakan masyarakat. Sektor keuangan dapat efektif jika ia dikelola dengan prinsip saling menguntungkan. Sektor ini secara tidak langsung menjadi tempat di mana para pemodal dan pembentuk modal bertemu. Selain itu, kendaraan butuh saluran pembuangan yang tepat. Di sinilah Islam menyediakan pelbagai sarana dalam bentuk filantropi Islam. Filantropi ini terdiri dari zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Dalam pengelolaan dana ziswaf perlu diupayakan satu jaringan distribusi kepada umat guna menciptakan masyarakat yang produktif.¹⁵

Ketiga komponen dasar tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan progresif hanya jika komponen itu mampu memperluas jangkauannya melalui proses pelebaran sayap memanfaatkan pelbagai media strategis dan dekat umat. Media dapat digunakan masjid sebagai tempat wadah untuk perbaikan mesin, produksi pelumas, dan pengoptimalan pembuangan yang produktif. "Perbaikan mesin" dimaksud adalah masjid menghadirkan pelbagai pelatihan, pembimbingan dan pengawalan terhadap para pelaku usaha guna membentuk pengusaha ulung dan berhasil. "Pelumas" dalam hal ini adalah peran masjid masjid dengan menghadirkan pelbagai aktivitas berbasis koperasi yang dapat "men-support" pendanaan pelaku usaha dengan sistem peminjaman modal usaha. Jika rangkaian proses ini mampu terjalin secara optimal, maka tidak menutup kemungkinan masjid dapat menghasilkan satu lingkungan masyarakat yang "konsumtif." Artinya masjid sebagai muara yang menjembatani sekaligus menyokong antara kebutuhan dan potensi produsen

¹⁵ Syauqi and Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 23–25.

sekaligus konsumen. Bahkan filantropi Islam yang dikelola masjid dapat terjaga keberlangsungan selama aktivitas produksi-distribusi dekat dengan masjid. Salah satu contoh peran masjid al-Akbar adalah hadirnya pasar rakyat di sekitaran masjid. Kondisi semacam ini bahkan menjelma menjadi tempat “*refreshing*” masyarakat sekitar.

Dalam sejarahnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuan berkelanjutan berdasar kesepakatan kurang lebih 139 negara. Tujuan ini dibuat untuk membangun dan memperbaiki kehidupan dunia yang lebih baik dari setiap dekadanya. Sebelum adanya SDGs ini terdapat *Millenium Development Goals* (MDGs) yang harus dicapai selama 15 tahun tahun yaitu mulai tahun 2000 sampai 2015. Apa yang membedakan MDGs dengan SDGs adalah negara yang bersepakat. Pada MDGs negara pakar ekonomi tergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional lain, sedangkan SDGs disepakati oleh negara-negara yang lebih luas dan juga melibatkan masyarakat sipil. Artinya cakupan SDGs lebih luas, beragam dan detail.

Ada setidaknya 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di antaranya: Memutus tali kemiskinan dan macam-macamnya;¹⁶ Meciptakan kedaulatan pangan dan memberantas kelaparan serta meningkatkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan; Melindungi dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan menguatkan kesejahteraan di semua usia masyarakat; Menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua masyarakat tanpa membanding-bandingkan; Pemberdayaan kaum perempuan dan menciptakan kesetaraan gender; Mewujudkan pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua; Menciptakan energi yang murah handal, dan modren;

¹⁶ Ngozi Helen Oguchi and Fen Luo, “Estimating the Nexus of Tourism on Sustainable Development Goals in Nigeria,” *Technium Social Sciences Journal* 20, no. 1 (June 8, 2021): 751-771, <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3422>.

Mengoptimalkan *economic growth* yang terukur bertahap dan progresif, peluang kerja yang layak; Menciptakan infrastruktur yang memadai dan efektif, mengoptimalkan industri yang progresif, bertahap dan efektif, dan mendorong untuk membangun inovasi; Mengurangi ketimpangan antar negara; Menciptakan wilayah yang nyaman, tangguh, bertahap dan progresif; Melindungi struktur produksi dan konsumsi yang progresif; Memutuskan kebijakan cepat dalam menghadapi perubahan iklim dan mengatasi perubahan iklim serta dampak yang diakibatkannya; Memberdayakan secara progresif sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berjangka, lestari, bertahap dan progresif; Memberdayakan, melindungi, dan mengoptimalkan pemanfaatan ekosistem daratan, pengelolaan hutan secara bijak dan ramah, mencegah penggurunan, memperbaiki penyusutan lahan, serta melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati agar tetap lestari dan menghentikan proses kelangkaan spesies hayati; Mengoptimalkan umat yang integritas dan menciptakan perdamaian untuk pembangunan yang progresif, lalu menyediakan lembaga keadilan dan menciptakan kelembagaan yang efektif integritas; Mengoptimalkan fasilitas pelaksana dan memperbaiki hubungan global untuk pembangunan yang progresif. Tampak jelas bahwa tendensi keseluruhan tujuan tersebut adalah untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

Sekilas antara pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan tampak mirip, namun berbeda. Pembangunan ekonomi merupakan proses terstruktur dalam rangka pembangunan kemajuan perekonomian. Tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Di lain pihak, ekonomi pembangun (*development economic*) merupakan satu studi tentang pembangunan kemajuan ekonomi suatu negara atau daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.¹⁷

¹⁷ Mit Witjaksono, "Pembangunan Ekonomi Dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah Dan Orientasi Dalam Konteks Studi Pembangunan," *Jurnal*

Meskipun demikian kedua hal tersebut merupakan komponen wajib yang selalu berkorelasi erat dengan perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan kemajuan ekonomi.

Dalam perkembangannya pembangunan ekonomi dalam Islam memiliki perbedaan yang cukup kentara dari ekonomi konvensional. Poin terpenting dalam hal ini adalah paradigma yang mendasari kedua sistem tersebut. Pada pembangunan ekonomi konvensional *framework* terpenting adalah menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, mengatasi dan memberikan solusi atas penghambat pembangunan ekonomi dan membuat kebijakan yang mempercepat pembangunan ekonomi. Akibatnya paradigma ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi di lain pihak ia juga sangat rentan menciptakan kesenjangan sosial yang tinggi. Dalam Islam, paradigma yang dipakai tidak melulu memperhatikan pertumbuhan ekonomi semata, namun mencakup area yang lebih luas. Area tersebut mencakup pembangunan secara materiil, spiritual dan sosial. Pembangunan spritual dan sosial diharuskan mampu terintegrasi dalam bentuk pembangunan ekonomi materiil.¹⁸ Di samping itu setiap kegiatan perekonomian dalam sektor riil, keuangan, sektor distribusi dan pemerataan selalu memerhatikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini tertuang dalam pelbagai tujuan (*maqāsid*) yang lebih memerhatikan nilai-nilai agama.

Lalu apa hubungan antara SDGs dengan ekonomi pembangunan? Untuk menghadirkan jawaban dari persoalan ini kiranya perlu untuk menegaskan bahwa SDGs sejatinya memiliki setidaknya 17 tujuan atau target yang disepakati. Tujuan tersebut harus dicapai pada jangka waktu yang telah ditargetkan untuk menciptakan sebuah kehidupan yang lebih sejahtera dan baik dari sebelumnya. Sedangkan ekonomi pembangunan adalah studi bagaimana cara bagaimana

Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP) 1, no. 1 (2009): 3–12, accessed June 23, 2021, <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5120>.

¹⁸ Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 21.

menciptakan sebuah kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara. Dalam ekonomi pembangunan terkhusus Islam terdapat seperangkat instrumen pembangun ekonomi dalam bentuk ZISWAF, sukuk dan produk bank syariah lainnya. dalam pembangunan ekonomi Islam para ekonom Islam mereinkarnasi fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ritual ibadah. Masjid dipakai sebagai media untuk membangun ekonomi. Dalam sejarahnya, dahulu Nabi memakai masjid sebagai pusat pemerintah dan membuat kebijakan dalam ranah ekonomi dan sosial. Inilah yang coba dikembangkan oleh al-Akbar, masjid sebagai pusat aktivitas masyarakat. Di samping itu masjid merupakan tempat yang strategis dan paling dekat masyarakat sehingga dalam pengelolaan instrumen pembangunan Islam terkhusus dana ZISWAF dapat dikelola dan disalurkan kepada yang membutuhkan.

Ekonomi berbasis masjid ini diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian 17 target SDGs di Indonesia. Sistem ekonomi semacam ini diharapkan mampu menjadi fondasi ekonomi umat hingga melahirkan generasi umat dan negara yang berdaya saing dan mandiri. Kemandirian merupakan harga mati, jika masyarakat atau negara ingin mewujudkan cita-cita mereka. Jika negara tidak mandiri dan bergantung pada negara lain, maka negara tersebut akan mudah dikontrol dan tidak dapat disebut sebagai negara yang berdaulat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan sebuah negara adalah ketergantungan terhadap pasokan barang dari negara lain. Oleh karena itu, ekonomi berbasis masjid berupaya untuk memberdayakan umat untuk dapat lebih produktif dan menjadi fondasi perekonomian umat.

Pengelolaan Dana Filantropi Islam pada Masjid Al-Akbar

ZISWAF merupakan singkatan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. ZISWAF dapat digolongkan sebagai filantropi Islam atau dana sosial dalam Islam. Seperti yang disebutkan pada sub bagian sebelumnya dana sosial Islam yang berupa ZISWAF merupakan satu media pemerataan pembangunan dan

“pembuangan” harta yang dianjurkan oleh Islam kepada pemeluknya. Al-Akbar sebagai salah satu masjid nasional yang terletak di kota Surabaya dikenal, masjid ini cukup besar dan dikenal memiliki desain struktur yang baik. Berbekal keindahan ini masjid al-Akbar sering menjadi tempat wisata bagi para wisatawan dari sekitar Surabaya bahkan tidak jarang ada beberapa wisatawan dari mancanegara.

Dengan potensinya yang cukup signifikan, para pengelolaan ZISWAF yang ada di masjid al-Akbar Surabaya secara umum dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian, bagian penghimpunan dan bagian distribusi ZISWAF. Pengelolaan ZISWAF di masjid al-Akbar tampak cukup terorganisir dan tersusun secara sistematis. Ini terlihat dari aktivitas pelbagai bidang unit kepengurusan yang cukup bervariasi. Setiap dari unit ini memiliki tugas masing-masing. Dalam pengelolaan zakat, persoalan terkait penghimpunan dana di masjid al-Akbar dikelola oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ). Bidang ini tidak semata berfungsi sebagai penghimpun dana zakat ia juga berperan sebagai penghimpun dana wakaf, sedekah sekaligus konsultan ekonomi syariah. Di lain pihak, peran pendistribusi dana sosial dan penentu kepada siapa dana tersebut akan disalurkan ada di bawah wewenang bidang sosial masjid al-Akbar.¹⁹

Bagian penghimpunan ZISWAF masjid al-Akbar Surabaya dikelola oleh UPZ ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat penghimpunan zakat. UPZ yang dibentuk dan telah didaftarkan di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut Muhammad Toha, ada dua jenis UPZ yaitu biasa dan mandiri. UPZ biasa haruslah bergerak sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh BAZNAS sedangkan UPZ mandiri diberikan kewenangan untuk membuat program-program yang inovatif berfungsi menarik minat masyarakat untuk mendermakan hartanya. Contoh UPZ mandiri adalah apa yang ada di masjid al-Akbar. UPZ ini tidak

¹⁹ Muhammad Toha, “Pengurus UPZ Al-Akbar,” *Interview* (Surabaya, February 10, 2020).

hanya menerima zakat namun juga sedekah, wakaf dan tidak semata-mata menerima dana sosial. UPZ juga membuat program yang menghimpun sedekah warga masyarakat berupa makanan dan *ta'jil* untuk berbuka puasa. Setiap paket *ta'jil* dihargai seharga Rp.11.000,-. Selain itu, UPZ masjid al-Akbar telah membuat program wakaf al-Qur'an yang sukses mengumpulkan 250 al-Qur'an wakaf seharga satuan Rp.100.900.-.²⁰

Guna memperoleh dana sosial masjid al-Akbar memanfaatkan pelbagai media, sesuai kebutuhan. Untuk mendapatkan wakaf pengurus masjid al-Akbar menyebarkan bermacam pamflet kepada jamaah secara langsung maupun melalui media instagram yang dikelola pengurus masjid. Terkait infak, menggunakan media kotak amal di setiap sudut lingkungan masjid. Kotak tersebut ditujukan sebagai biaya atas pemanfaatan fasilitas masjid seperti tempat parkir, naik ke menara masjid, peminjaman tempat untuk pelbagai kegiatan semacam resepsi, wisuda dan acara besar. Ada juga dana sedekah diperoleh dari hasil unit usaha masjid serta masyarakat umum yang ingin memberikan sedekah. Zakat diperoleh setidaknya melalui dua cara: zakat *māl* dan zakat fitrah.

Pengelolaan dana sosial yang terkumpul diserahkan pada bidang sosial masjid al-Akbar. Ia dipergunakan sebagai biaya keperluan masjid, subsidi unit usaha masjid, dan beberapa golongan umat yang membutuhkan. Peruntukan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf berbeda-beda distribusinya. Infak dan sedekah diperuntukkan pembangunan, perawatan, operasional masjid dan masyarakat yang membutuhkan. Wakaf dimanfaatkan untuk semua orang. Zakat diberikan kepada 8 golongan yang telah ditentukan oleh syariat.

Pemanfaatan dana sosial yang digunakan sebagai subsidi bagi unit usaha masjid bisa dikatakan cukup produktif. Subsidi diberikan guna meringankan dan membantu unit usaha agar lebih berkembang dan maju. Tujuannya menambah

²⁰ Ibid.

pendapatan unit dan menyisakan hasilnya untuk masjid. Unit usaha yang diberikan subsidi dari masjid salah satunya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) al-Marwah. KJKS al-Marwah diberi subsidi dari masjid al-Akbar berupa subsidi atas pembayaran listrik.²¹

Pemanfaatan dana filantropi Islam terkhusus infak oleh pengurus masjid al-Akbar menurut penelitian yang dilakukan Fitri Nurul Azizah Afandi, di Masjid al-Akbar terbagi menjadi empat kelompok, direktorat tarbiyah, *imārah*, *siyānah* (*ri'āyah*), kesekretariatan. Prosentase yang didapati menunjukkan angka sebagai berikut: direktorat tarbiyah 16%; direktorat *imārah* 17%; direktorat *ri'āyah* 25%; dan kesekretariatan 42%. Prosentase ini menunjukkan bahwa pemanfaatan infak lebih dominan dalam hal kesekretariatan. Kesekretariatan ini bidangnya adalah dalam hal dana operasional masjid seperti upah tenaga kerja, pajak kendaraan, biaya listrik, biaya perjalanan dinas. Direktorat tarbiyah pemfokusannya dalam hal pelaksanaan pendidikan, lalu direktorat *imārah* pemfokusannya terkait pelaksanaan peribadatan di masjid, dan untuk direktorat *ri'āyah* adalah untuk perawatan dan pembangunan masjid. Dalam hal pemberian dana sosial yang mana dimanfaatkan untuk berdayanya umat dalam sektor ekonomi, pengurus masjid al-Akbar masih menggunakan sumber dana yang berasal dari zakat *māl*. Kegiatan yang diadakan menggunakan dana yang bersumber dari zakat ini berupa pemberian modal usaha kepada para *mustahik* dan pemberian pelatihan *soft skill* dalam berwirausaha. Dalam pelaksanaan program zakat produktif ini pihak masjid al-Akbar tidak hanya memberikan modal dan pelatihan namun juga membantu *mustahiq* dalam hal perencanaan usahanya dan melakukan proses *controlling* secara berkala. Program zakat

²¹ Fitri Nurul Azizah Afandi, *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 110, <http://httpdigilib.uinsby.ac.id33053>.

produktif ini telah berhasil menambah pendapatan para mustahiq dan harapanya akan menjadi *muzakki*.²²

Al-Akbar sebagai *Islamic Center* berperan multidimensi. Berangkat dari visi “Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya terdepan dalam penyelenggaraan peribadatan, dakwah dan syiar Islam, pendidikan, sosial budaya, dan manajemen menuju masyarakat yang berakhlak mulia sesuai ajaran Islam”. Visi ini digunakan sebagai semangat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang ada di masjid. Dalam usahanya untuk mewujudkan visi tersebut al-Akbar selalu mencanangkan pelbagai program dan menghadirkan fasilitas guna mendukung perannya sebagai *Islamic center*. Upaya yang dilakukan al-Akbar dimulai dari memperbaiki manajemen masjid, menjalankan fungsi utama masjid, membangun unit-unit usaha, fasilitas pendukung, serta sosialisasi dan pelatihan wirausaha.²³

Kegiatan utama masjid al-Akbar adalah melakukan kegiatan peribadatan dan syiar Islam. Syiar di masjid al-Akbar dilakukan mempergunakan beberapa media. Seperti siaran langsung dakwah di radio SAS (Suara Akbar Surabaya), rekaman video dakwa di-“*follow up*” melalui media sosial, bahkan ada kalanya *review* khutbah jumat diterbitkan dalam bentuk selebaran yang terbit pada jumat esoknya serta dibagikan ke jamaah. Proses ini didukung melalui pelbagai fasilitas, seperti perpustakaan, poliklinik, thibun nabawi, menara, konsultasi keluarga dan edu-park.²⁴ Perpustakaan dapat dimanfaatkan setiap yang berkunjung di masjid al-Akbar. Caranya dengan mengunjungi atau langsung membaca apa yang tersedia di perpustakaan dengan hanya mengisi daftar pengunjung perpustakaan. Poliklinik masjid al-Akbar terdiri dari poli umum dan gigi.

²² Ibid.

²³ Imron Mustofa, “Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi Di Indonesia,” *Halaqa: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (June 15, 2017): 27–42, accessed March 3, 2021, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa/article/view/821>.

²⁴ Sistem Informasi Masjid al-Akbar, “Fasilitas,” accessed February 16, 2021, <https://www.masjidal-akbar.or.id/fasilitas/>.

Keduanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Poliklinik juga menyediakan mobil ambulance dan mobil jenazah. Setiap masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas poliklinik dianjurkan untuk membayar infak. Kaum dhuafa mendapat keringanan dan tidak dipungut biaya dalam penggunaan setiap fasilitas poliklinik. Selain itu ada pula thibun nabawi al-Akbar yang merupakan pengobatan tradisional ala Rasul yang berupa bekam dan Ruqyah.

Ada juga fasilitas menara masjid al-Akbar. Menara ini merupakan fasilitas wisata. Ketinggiannya mencapai 99 meter. 99 melambangkan *asmā' al-ḥusnā*. Di atas menara pengunjung dapat melihat daerah sekitar Surabaya. Selain sebagai tempat hiburan fasilitas wisata ini juga diperuntukkan sebagai media penelitian, utamanya melihat hilal ketika penentuan 1 Syawal. Untuk memanfaatkan fasilitas ini setiap pengunjung diharuskan mengisi infak Rp.7000 untuk dewasa dan Rp.5000 untuk anak-anak. Al-Akbar juga memiliki fasilitas pendidikan dan konsultasi keluarga. Edu-Park baru diresmikan tahun 2019. Di taman ini terdapat beragam tanaman mulai dari tanaman toga (tanaman obat keluarga), buah, bunga, dan tanaman dengan media hidroponik. Pengunjung dapat memetik hasil yang ada di taman edu-park selama musim panen. Konsultasi keluarga dinaungi kabid pengajian muslimah. Konsultasi keluarga ini dapat diakses oleh masyarakat ketika guna mencari solusi dalam permasalahan keluarga. Selain itu, ada infak fasilitas yang berupa penggunaan fasilitas masjid untuk kegiatan umat. Kegiatan semacam resepsi pernikahan, akad nikah, tabligh akbar dan wisuda akan dikenakan tarif infak yang telah ditentukan oleh masjid.

Masjid Al-Akbar Surabaya juga memiliki Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) al-Marwah Surabaya. al-Marwah merupakan koperasi yang hanya beranggotakan seluruh tenaga kerja dan pengurus masjid Al-Akbar. Keikutsertaan koperasi ini wajib bagi segenap tenaga kerja dan pengurus masjid. Oleh karena itu, anggota KJKS sejumlah tenaga kerja yang ada di masjid al-Akbar, yang ketika penelitian dilakukan, berkisar 232 anggota aktif. Menurut Ika “setiap ada pekerja baru yang ada di

masjid al-Akbar maka pihak koperasi ketika melakukan penginformasian penagihan angsuran di pihak masjid al-Akbar maka akan diberitahu bahwa ada anggota baru lalu pihak KJKS al-Marwah akan menghubungi anggota baru itu untuk bergabung menjadi anggota koperasi.”²⁵ Rata-rata anggota mengajukan pembiayaan di KJKS adalah untuk membeli barang, keperluan renovasi rumah dan biaya anak sekolah. Nilai plus dari KJKS ini terletak pada keharusan untuk memberikan jaminan ketika ada transaksi peminjaman.²⁶ Pada rapat anggota tahunan 2019 setiap anggota rata-rata mendapatkan pembagian sisa hasil usaha sebesar Rp. 439.509.²⁷

Optimalisasi Peran Masjid dalam Mewujudkan SDGs

Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dipraktikkan al-Akbar dapat digolongkan sebagai satu usaha mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pemberdayaan masjid al-Akbar yang menjadi tempat observasi dan riset peneliti merupakan konsep gambaran peran masjid yang jarang dimanfaatkan oleh masjid-masjid lain di Indonesia. Ini sekaligus dapat dijadikan contoh sekaligus bukti efektifitas pemberdayaan masjid untuk kemaslahatan umat. Langkah pengurus masjid dalam membagi pengelolaannya ke dalam dua kelompok besar: filantropi Islam dan pemanfaatan fasilitas merupakan cerminan sikap yang mendorong terwujudnya *sustainable development*. Terkait filantropi Islam al-Akbar cukup komprehensif dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana tersebut. Dalam segi pemanfaatan fasilitas masjid al-Akbar cukup menunjukkan eksistensinya yang krusial di tengah kebutuhan masyarakat yang berlimpah. Bahkan, peniadaan biaya dalam beberapa pemanfaatan

²⁵ Ika, “Pengelola KJKS Al-Marwah,” *Interview* (Surabaya, February 15, 2020).

²⁶ Eko, “Penjaga Menara Masjid Al-Akbar,” *Interview* (Surabaya, February 15, 2020).

²⁷ Tim KJKS al-Marwah, *Laporan Pertanggung Jawaban Rapat Anggota Tahunan (RAT)* (Surabaya, 2019).

fasilitasnya pun cukup menghadirkan dampak yang signifikan bagi perkembangan masyarakat.

Ditinjau dari segi tujuh belas target *Sustainable Development Goals* masjid al-Akbar telah menunjukkan peran yang cukup baik. Jika dibandingkan dengan catatan yang dihasilkan oleh Smeru Research Institute terkait target pencapaiannya tahun 2030, al-Akbar bisa disebut sebagai salah satu pioner dalam proses itu.²⁸ Tujuan pertama terkait kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan sebuah PR (pekerjaan rumah) yang selalu ada di setiap periode kepemimpinan seorang pemimpin. Penyebab kemiskinan ini disinyalir tidak pernah tuntas. Apakah disebabkan masyarakat Indonesia yang tidak mau berfikir proses memperbaiki standar kesejahteraan hidupnya? atau apakah pemerintah Indonesia yang tidak bisa menemukan sebuah solusi yang solutif? Jawaban dan lempar-melempar tanggung jawab merupakan tindakan yang tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Dalam hal ini, al-Akbar mencoba hadir di tengah realitas masyarakat dengan pelbagai persoalan tersebut. Letak Geografis yang berada di Surabaya, salah satu kota terbesar di Indonesia, telah secara tidak langsung mendorong al-Akbar untuk dapat “berhadapan” dengan realitas masyarakat yang beragam.

Menurut Smeru Research Institute ada 4 penyebab yang menghalangi Indonesia terbebas dari belenggu kemiskinan. (1) Ketidakpastian kondisi ekonomi internasional dan ketidakpastian kondisi ekosistem politik; (2) Minimnya pendidikan berkualitas yang diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu; (3) Kurangnya DIKLAT (pendidikan dan pelatihan) ketrampilan bagi pemuda dan masyarakat miskin; (4) Riset tentang kemiskinan yang bersifat dinamis sehingga tidak mendapatkan data yang bersifat efektif untuk digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan. Dari ketiga persoalan

²⁸ Smeru Research Institute, “Dari MDGs KE SDGs: Menyiapkan Langkah Konkret,” *Buletin Smeru Research Institute* (Jakarta, 2017), 5, accessed June 23, 2021, www.smeru.or.id.

tersebut barangkali ranah yang belum cukup maksimal dimanfaatkan oleh masjid al-Akbar melalui beberapa lembaganya ada pada persoalan kondisi ekonomi Internasional dan ketidakpastian politik. Ini dapat dimaklumi terkait keterbatasan ruang lingkup yang dimiliki oleh masjid al-Akbar

Tujuan *Sustainable Development Goals* ke-terkait 8 pekerjaan yang layak. Peluang pekerjaan yang layak ini merupakan sebuah problematika yang akan rumit ketika masalah peluang pekerjaan dihadapkan pada dua unsur yaitu unsur kebutuhan hidup yang semakin hari meningkat dan peluang kerja yang semakin dikit. Akibat dari fenomena ini adalah akan menciptakan sebuah keterpaksaan bagi pekerja untuk bekerja ditempat dan sistem yang tidak layak. Tidak layak ini dapat diartikan tidak sesuai dengan *rule* Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, al-Akbar tampak mencoba menghadirkan pelbagai kesempatan yang mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru serta pengembangan usaha/perekonomian yang telah ada. Pemberian pelatihan tata usaha, sokongan pinjaman dana pendidikan dan kesejahteraan anggota serta pemanfaatan beberapa fasilitas secara gratis telah secara nyata mendorong ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak dan bernilai.

Secara umum untuk menghapus kemiskinan di Indonesia, masjid al-Akbar dalam mengelola dana filantropi Islam dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk pemenuhan kebutuhan golongan miskin telah berjalan. Dalam pembahasan dana filantropi Islam khususnya infak terdapat prosentase pembagian penggunaan yaitu dalam bagian sektor tarbiyah, kesekretariatan, *ri'ayah* dan *imarah* telah dilaksanakan sebagaimana fungsi setiap sektor. Dalam ranah tarbiyah masjid al-Akbar memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan mulai dari tingkat RA, MI, dan STAI sehingga pemanfaatan dalam bentuk beasiswa ini masyarakat miskin yang mendapatkan pendidikan yang layak sampai menara gading.

Dalam ranah pemberdayaan ekonomi umat masjid al-Akbar telah mengelola dana filantropi Islamnya khususnya dengan

memanfaatkan sektor zakat *māl*. Pemanfaatan zakat *māl* ini dikonseptkan dalam sebuah pemberian bantuan modal usaha dan memberikan pelatihan dan pengawasan dalam pengelolaan usahanya. Dalam program ini diharapkan para peserta (*mustahik*) akan menjadi berdaya dan mandiri sehingga akan menjadi *muzakki*. Hal ini harus dioptimalisasi pengelolaannya dananya sehingga tidak hanya dalam sektor zakat *māl* akan tetapi dapat pada sektor infak. Dalam peruntukkan program pemberdayaan umat dapat merambah bukan hanya para *mustahik* akan tetapi masyarakat umum dan para tenaga kerja masjid al-Akbar. Sehingga program ini akan menjadikan masyarakat lingkungan masjid menjadi dan bangsa Indonesia secara umumnya dapat menjadi bangsa yang berdaulat dan tidak bergantung pada negara lain.

Pemanfaatan fasilitas bagi penyelesaian permasalahan yang diprioritaskan di atas bermanfaat guna memenuhi kebutuhan primer bagi masyarakat kecil dan tenaga kerja. Pemenuhan kebutuhan primer bagi masyarakat kecil ini di masjid al-Akbar berupa pemanfaatan mobil ambulance dan mobil jenazah, lalu dalam pemanfaatan poliklinik dan praktek pengobatan alternatif Thibun Nabawi bagi masyarakat miskin. Untuk tenaga kerja ini masjid al-Akbar memiliki fasilitas yang berupa unit usaha. Unit usaha tersebut berupa lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) al-Marwah. KJKS berguna bagi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan yang mendadak karena menurut koresponden yang peneliti wawancarai, koresponden dengan menggunakan KJKS ini para tenaga kerja dapat melakukan pembiayaan tanpa menggunakan jaminan dan tidak perlu prosedur yang rumit. Rata-rata penggunaan produk pembiayaan ini terdapat dua penggunaan: untuk biaya anak sekolah dan renovasi rumah. KJKS tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja akan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk para wirausaha yang mana wirausaha yang ada di bawah didikan dari masjid al-Akbar. Oleh karena KJKS ini merupakan sebuah lembaga keuangan yang penting bagi sarana kemajuan wirausaha dalam membangun usaha

yang lebih besar, maka dari itu fungsinya harus diotimalkan dalam fungsi pemberdayaan masjid.

Lalu masjid al-Akbar juga dapat dalam pengelolaannya dapat memanfaatkan halamannya untuk penggerakan ekonomi pedagang kaki lima masyarakat. Melalui pemberdayaan pedagang kaki lima melalui membuat paguyuban pedagang membuat penggerakan ekonomi rakyat lebih cepat dan berkembang dan sistem kordinasi dan kontrol pedagang lebih efektif dan tertib. Paguyuban tersebut dinaungi oleh KJKS untuk pengelolaannya sehingga pedagang kaki lima harus mendaftar menjadi anggota koperasi dan dapat mengajukan pembiayaan yang prospeknya ke pertumbuhan usahanya. Oleh karena itu masjid al-Akbar dapat memanfaatkan lokasi yang difungsikan untuk pedagang kaki lima berjualan dengan hanya membayar sewa lahan kepada koperasi dengan uang sewa terjangkau dan target pembeli yang dari semua kalangan.

Penutup

Ekonomi berbasis masjid bagi masyarakat merupakan sebuah fondasi untuk menciptakan kesejahteraan, kedaulatan, dan keberdayaan umat. Untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) perlu pengoptimalan peran ekonomi berbasis masjid sehingga menjadi fondasi kesejahteraan umat. Dalam pemberdayaan masjid di al-Akbar dalam mendukung perekonomian masjid telah berjalan, terutama dalam pengelolaan filantropi Islam. Peran ekonomi berbasis masjid al-Akbar sebagai pembangunan ekonomi butuh pengoptimalan dalam hal pengelolaan filantropi. Di samping itu untuk pemanfaatan fasilitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pasar rakyat. Pengusaha yang menjadi binaan dari masjid al-Akbar dapat mendaftar ke KJKS al-Marwah.

Daftar Pustaka

Afandi, Fitri Nurul Azizah. *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

- <http://httpdigilib.uinsby.ac.id33053>.
- Badan Pusat Statistik. "Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018." Accessed June 20, 2019. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html>.
- Dewan Masjid Indonesia. "ISYEF Lanjutkan Upaya Penguatan Ekonomi Masjid." Accessed May 23, 2021. <https://www.dmi.or.id/isyef-lanjutkan-upaya-penguatan-ekonomi-masjid/>.
- Eko. "Penjaga Menara Masjid Al-Akbar." *Interview*. Surabaya, February 15, 2020.
- Hamdani. "Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Peradaban Umat Islam Halaman 1 - Kompasiana.Com." Accessed April 23, 2021. <https://thr.kompasiana.com/cangkoiburong/5cd118936c329d111e5f07d3/menjadikan-masjid-sebagai-pusat-peradaban-ummat-Islam>.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2017.
- Ika. "Pengelola KJKS Al-Marwah." *Interview*. Surabaya, February 15, 2020.
- Ishatono, Ishatono, and Santoso Tri Raharjo. "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (December 24, 2016): 159–167. Accessed June 23, 2021. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13198/0>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)." *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (November 11, 2016): 227–245. Accessed June 23, 2021. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>.
- Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economic*. 2nd ed. Malaysia: Zafar SDN BHD, 1981.
- Made. "28 Organisasi Dibawah PBB Beserta Tugas-Tugasnya." Accessed June 23, 2021. <https://made-blog.com/organisasi-di-bawah-naungan-pbb/>.

- Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 1 (2020): 144–174.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4064>.
- . "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'ān Abdullah Saeed." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (March 1, 2016): 465–491. Accessed March 3, 2021.
<http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/321>.
- . "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi Di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (June 15, 2017): 27–42. Accessed March 3, 2021.
<http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa/article/view/821>.
- Oguchi, Ngozi Helen, and Fen Luo. "Estimating the Nexus of Tourism on Sustainable Development Goals in Nigeria." *Technium Social Sciences Journal* 20, no. 1 (June 8, 2021): 751–771.
<https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3422>.
- Rianz. "Masjid Jogokariyan Yang Saldo Kasnya Selalu Nol Rupiah." Accessed May 23, 2021.
<https://akuratnews.com/masjid-jogokariyan-yang-saldo-kasnya-selalu-nol-rupiah/>.
- Sistem Informasi Masjid al-Akbar. "Fasilitas." Accessed February 16, 2021. <https://www.masjidal-akbar.or.id/fasilitas/>.
- Smeru Research Institute. "Dari MDGs KE SDGs: Menyiapkan Langkah Konkret." *Buletin Smeru Research Institute*. Jakarta, 2017. Accessed June 23, 2021. www.smeru.or.id.
- Supandi, Achmad Faqih. "Model Pengembangan Zakat Produktif Di Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (December 26, 2019): 113–130. Accessed June 23, 2021.
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/mabsya/>

- article/view/3458.
- Syauqi, Irfan, and Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. 2nd ed. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Tim Editor. "Resmikan ISYEF, Syarifuddin: Pemberdayaan Ekonomi Masjid." Accessed May 23, 2021.
<https://era.id/afair/15409/resmikan-isyef-syarifuddin-pemberdayaan-ekonomi-masjid>.
- Tim KJKS al-Marwah. *Laporan Pertanggung Jawaban Rapat Anggota Tahunan (RAT)*. Surabaya, 2019.
- Toha, Muhammad. "Pengurus UPZ Al-Akbar." *Interview*. Surabaya, February 10, 2020.
- Witjaksono, Mit. "Pembangunan Ekonomi Dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah Dan Orientasi Dalam Konteks Studi Pembangunan." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)* 1, no. 1 (2009): 1–12. Accessed June 23, 2021.
<http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5120>.
- Al-Qur'an*, n.d.